

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017-2018 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi pemberian opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu selama beberapa tahun hingga tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu masih mendapat opini wajar dengan pengecualian karena masih rendahnya pemahaman dan kesadaran untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil temuan BPK, dan kurang optimalnya pengelolaan aset daerah dan masih ditemukan kasus-kasus yang ada pada sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan SAP dan kecukupan pengungkapan.
2. Berdasarkan hasil analisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Belu meraih opini wajar tanpa pengecualian karena upaya- upaya yang dilakukan yaitu memahami dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan inventarisasi terhadap aset yang telah rusak berat, hilang, status kepemilikannya belum jelas, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak diketahui keberadaannya dan kemudian melakukan penelusuran lebih

lanjut atas aset yang akan diusulkan untuk dihapuskan, mengupayakan surat edaran Bupati kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran agar melakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Pemerintah daerah Kabupaten Belu terus berupaya dan mendorong SKPD- SKPD atau Pengguna Anggaran agar terus bekerja keras sehingga tetap mempertahankan opini yang sudah ada dan mendapatkan opini yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian Daerah harus memprioritaskan kemampuan calon pegawai dalam hal akuntansi dan penganggaran untuk ditempatkan pada bagian keuangan yang pada dasarnya merupakan bagian yang paling sering terjadi masalah.
- b. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK di tahun-tahun sebelumnya atas temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern.
- c. Mengadakan pembenahan di seluruh satuan kinerja terhadap sistem pelaporan akuntansi pada belanja modal dengan laporan kepemilikan
- d. BPKAD, khususnya di bidang asset harus dibenahi pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., Randal, J. & S.B, M. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* (Dua Belas). Erlangga.
- Arief Atmaja, RM Syah dan Probohudono, Agung Nur. 2015. *Analisis Audit BPK RI terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakepatuhan dan kerugian Negara*.
- Bastian, indra. 2007. *Audit Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, indra. 2014. *Audit Sektor Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK – RI, 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I & II Tahun 2014*, Jakarta. <http://www.bpk.go.id//>
- BPK – RI, 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I & II Tahun 2015*, Jakarta. <http://www.bpk.go.id//>
- BPK- RI, 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I & II Tahun 2016*, Jakarta. <http://www.bpk.go.id//>
- BPK- RI, 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I & II Tahun 2017*, Jakarta. <http://www.bpk.go.id//>
- Elli Widya, (2011). *Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pemerintah Daerah*. BPFE.
- Halim, Abdul (2008). *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan UPP STIMYKPN*. Yogyakarta.
- Irwanto rante, Agustinus sale dan Elsyah R. Marlissa, 2010. *Analisis Terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang*, jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah
- LHP- LKPD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014
<http://www.Kupang.bpk.go.id>.
- LHP- LKPD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015
<http://www.Kupang.bpk.go.id>.
- LHP- LKPD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2016
<http://www.Kupang.bpk.go.id>.

LHP- LKPD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017
<http://www.Kupang.bpk.go.id>.

LHP-LKPD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018
<http://www.Kupang.bpk.go.id>.

Lalu Riza Ihwandi (2016), *Analisis Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat*

Muryanto, Budiarmo dan Ramadana. 2005. *Audit sektor publik suatu pengantar bagi pembangunan akuntabilitas instansi pemerintah*. LPKPAP.BPPK RI

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 01 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan keuangan Negara*

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 01 Tahun 2017 tentang *Standar Pemeriksa Keuangan Negara*

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Ramya Atyanta (2010) *Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Rifki Nugroho Arifin (2018), *Analisis opini BPK Daerah Istimewah Yogyakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010-2016*.

Sipahutar & Khairani (2014), *Analisis Perubahan opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang*.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Taufikrahman,2014. *Analisis Factor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit oleh BPK-RI atas LKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sumatera Utara*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang- Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang – Undang No.15 Tahun 2006 Tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.